

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH

REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI

PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT*

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON VISA EXEMPTION

FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Ljubljana, Slovenia, pada tanggal 26 November 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Slovenia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Slovenia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 November 2010 di Ljubljana, Slovenia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovenia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovenia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk semakin memperkuat hubungan bersahabat dengan memfasilitasi masuknya para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Slovenia ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL I
PEMBEBASAN VISA**

Warga Negara para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal di wilayah Pihak lain untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal kedatangan pertama.

-2-

PASAL 2
PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga Negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan di wilayah Pihak lainnya sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler, termasuk anggota keluarganya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari masing-masing Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.

-3-

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya dan tinggal didalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan terkait masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua negara yang terkait dengan keamanan dalam negeri, dan masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak untuk memberikan izin masuk atau mempersingkat masa tinggal *persona non grata* atau setiap orang yang dianggap dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

PASAL 6
PENANGGUHAN

Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik. Pengenalan dan penghentian tindakan dimaksud wajib dikomunikasikan kepada pihak lainnya, melalui saluran diplomatik tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam sebelumnya.

-4-

PASAL 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para pihak wajib bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap Paspor yang telah ada, Para pihak wajib menginformasikan pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan mengirimkan contoh-contoh paspor tersebut tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinas di wilayah negara pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakili negara asalnya. Misi diplomatik atau pos konsuler dimaksud wajib, sesuai dengan peraturan di negaranya, menerbitkan kepada yang bersangkutan suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

-5-

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau diperbaiki, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan atau perbaikan wajib berlaku sesuai dengan pasal 10 ayat 1, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam prosedur internal masing-masing Pihak telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

-6-

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Ljubljana, pada tanggal 26 November 2010, dalam rangkap dua asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Slovenia, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L.P. MARSUDI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SLOVENIA**



ANDRAŽ ZIDAR



REPUBLIK INDONESIA

**Sporazum med
Vlado Republike Indonezije
in
Vlado Republike Slovenije
o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih
potnih listov**

Vlada Republike Indonezije in Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se

ob upoštevanju prijateljskih odnosov med pogodbenicama,

v želji, da okrepita prijateljske odnose s poenostavijo vstopa imetnikov diplomatskih in službenih potnih listov Republike Indonezije in Republike Slovenije v državi pogodbenic,

v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi obeh držav

dogovorili:

1. člen

Odprava vizumske obveznosti

Državljanom pogodbenic, ki so imetniki veljavnih diplomatskih in službenih potnih listov, ni treba pridobiti vizuma za vstop na ozemlje druge pogodbenice, potovanje čez en ali bivanje tam za največ trideset (30) dni v obdobju šestih (6) mesecev od dneva prvega vstopa.

2. člen**Veljavnost potnega lista**

Na dan vstopa na ozemlje druge pogodbenice mora diplomatski ali službeni potni list državljanov pogodbenic veljati še najmanj šest (6) mesecev.

3. člen**Vizumi za člane diplomatskega predstavništva ali konzulata**

Državljeni pogodbenice, ki so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov in so napoteni na ozemlje države druge pogodbenice kot člani diplomatskih predstavništev ali konzulatov, ter njihovi družinski člani morajo pred vstopom pri veleposlaništvu druge pogodbenice pridobiti ustrezen vstopni vizum.

4. člen**Pogoji za vstop in izstop**

Imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov pogodbenic iz tega sporazuma lahko vstopijo na ozemlje države druge pogodbenice ali ga zapustijo na vsakem mejnem prehodu, ki so ga za ta namen določili pristojni organi za področje priseljevanja, brez vsakršnih omejitev razen tistih, ki jih določajo varnostni, carinski, sanitarni in vstopni predpisi ter predpisi v zvezi s priseljevanjem in drugi predpisi, ki se uporabljajo za imetnike takih veljavnih potnih listov.

5. člen**Pravice pristojnih organov**

1. Po tem sporazumu državljani pogodbenic niso izvzeti iz spoštovanja zakonov in predpisov druge pogodbenice pri vstopu na njeno ozemlje in med bivanjem na njem, med njimi zakonov in predpisov o vstopu, bivanju in izstopu tujcev iz države.
2. Ta sporazum ne vpliva na veljavne zakone ali predpise obeh držav s področja notranje varnosti ter vstopa, bivanja ali gibanja tujcev.
3. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da zavrneta vstop ali skrajšata bivanje nezaželenim osebam ali osebam, ki bi utegnile ogroziti javni red in mir, javno zdravje ali državno varnost.

6. člen**Odlog izvajanja**

Pogodbenici lahko zaradi državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja v celoti ali delno odložita izvajanje tega sporazuma. O uvedbi ali prenehanju teh ukrepov po diplomatski poti pravočasno obvestita drugo pogodbenico vsaj dvainsedemdeset (72) ur vnaprej.

7. člen**Vzorci in izdaja potnih listov ali potnih listin**

1. Pogodbenici si v tridesetih (30) dneh po podpisu tega sporazuma po diplomatski poti izmenjata vzorce veljavnih diplomatskih in službenih potnih listov.
2. Ob uvedbi novih diplomatskih ali službenih potnih listov ali ob spremembah obstoječih se pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestita o morebitnih spremembah najmanj trideset (30) dni pred njihovo uradno uvedbo.
3. Če državljani ene od pogodbenic izgubijo ali poškodujejo diplomatski ali službeni potni list na ozemlju države druge pogodbenice, o tem takoj obvestijo pristojne organe v državi sprejemnici prek diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki zastopa državo izvora. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat izda tem osebam v skladu s svojo zakonodajo dokument za vrnitev v državo izvora.

8. člen**Reševanje sporov**

Nesoglasja ali spori, povezani z razlago ali izvajanjem določb tega sporazuma, se rešujejo prijateljsko s posvetovanji ali pogajanja med pogodbenicama.

9. člen
Spremembe

Sporazum se lahko po potrebi spremeni ali dopolni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Take spremembe ali dopolnitve začnejo veljati v skladu z določbo prvega odstavka 10. člena in so sestavni del tega sporazuma.

10. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1. Ta sporazum začne veljati trideset (30) dni od dneva prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene vse zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma v skladu z njunimi notranjepravnimi postopki.
2. Sporazum velja pet (5) let in se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če ena od pogodbenic o tem druge pisno ne obvesti po diplomatski poti in najmanj trideset (30) dni pred pričakovanim dnevom odpovedi.

V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.

Sestavljeno v Ljubljani dne 26. novembra 2010 v dveh izvornikih v indonezijskem, slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.

**Za Vlado
Republike Indonezije**


RETNO L.P. MARSUDI

**Za Vlado
Republike Slovenije**


ANDRAŽ ZIDAR



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia, and the Government of the Republic of Slovenia hereinafter referred to as "**the Parties**",

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations by facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic of Indonesia and the Republic of Slovenia into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing law and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

Nationals of the Parties, holders of valid diplomatic and service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit or stay in the territory of the country of the other Party for a period not exceeding 30 (thirty) days within 6 (six) months from the date of first entry.

-2-

ARTICLE 2
PASSPORT VALIDITY

The diplomatic or service passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the country of the other Party.

ARTICLE 3
VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports and posted in the territory of the country of the other Party as members of diplomatic missions or consular posts, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visas from the Embassy of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Holders of valid diplomatic or service passports of either Party referred to in this Agreement, may enter into and depart from the territory of the country of the other Party, at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions applicable to holders of such valid passports.

-3-

ARTICLE 5
RIGHTS OF COMPETENT AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to abide by the laws and regulations of the other Party when entering its territory and staying in it, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreign nationals.
2. This Agreement shall not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, stay or movement of foreign nationals.
3. The Parties reserve the rights to refuse admission to or shorten the stay of *personae non gratae* or persons likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 6
SUSPENSION

Either Party may temporarily suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health. The introduction, as well as termination of such measures shall be duly communicated to the other Party through diplomatic channels no less than 72 (seventy two) hours in advance.

-4-

ARTICLE 7

SPECIMENS AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange specimens of their valid diplomatic and service passports through diplomatic channels, within 30 (thirty) days of signing this Agreement.
2. In case of the introduction of new diplomatic or service passports, as well as, modifications to existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of any changes no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform competent authorities in the receiving country through the diplomatic mission or consular post representing the country of origin. The diplomatic mission or consular post concerned shall, in compliance with the legislation of its country, issue such persons with a document to return to the country of origin.

ARTICLE 8

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

-5-

**ARTICLE 9
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised, if deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendments or revisions shall enter into force according to the provision of paragraph 1 Article 10, and form an integral part of this Agreement.

**PASAL 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

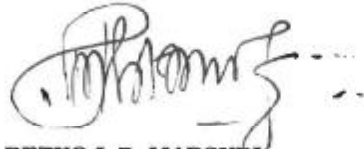
1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channel, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed automatically for further 5 (five) year periods, unless either Party decides to terminate it by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the expected date of termination.

-6-

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

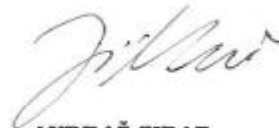
DONE in Ljubljana on 26 November 2010 in two originals, each in the Indonesian, Slovenian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L.P. MARSUDI

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA**



ANDRAŽ ZIDAR